



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 18 November 2019
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: Penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengenai <i>Grand Design</i> Program dan Kegiatan yang akan dicapai (<i>ter-delivery</i>) pada Tahun 2019-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 37 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 13.15 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan terobosan dan inovasi terhadap dana investasi sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.
2. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan percepatan sosialisasi program dan kegiatan secara masif, merata dan inovatif kepada masyarakat sehingga citra BPJS Ketenagakerjaan lebih dikenal dan lebih baik.
3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Neraca laporan keuangan dan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik yang terbaru
 - b. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2018 dan perbandingannya dengan tahun 2017 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
 - c. Daftar perusahaan beserta nominal investasi termasuk rincian hasil investasi dan pemanfaatannya.
 - d. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dan belum ditindaklanjuti
 - e. Nama desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan data PERISAI yang aktif
 - f. Data seluruh kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) tahun 2017-2018
 - g. Mitra usaha program vokasi yang diselenggarakan.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan upaya-upaya:
 - a. Peningkatan jumlah kepesertaan termasuk pekerja *home industry*, pekerja rentan dan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. Penyelesaian kompleksitas masalah PMI khususnya pada negara penempatan yang tidak memiliki hubungan diplomatik dan perwakilan Republik Indonesia pada negara penempatan.
5. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyempurnakan *grand design* terhadap dampak revolusi industri bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

6. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan konsep jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia.
7. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa sadar jaminan sosial Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan program tersebut agar melibatkan Komisi IX DPR RI.
8. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan, dalam pelaksanaan program pelatihan vokasi untuk bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas yang tersebar diseluruh Indonesia.
9. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan RDP dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan khusus pendalaman dana investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
10. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, untuk disampaikan paling lama 28 November 2019.

III. PENUTUP

Rapat diakhiri pukul 19.00 WIB.

Jakarta, 18 November 2019

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,

TTD.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE
A-393

